

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi bagi sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Dalam hal tersebut pemilihan umum menjadi jalan terciptanya demokrasi di suatu negara. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi serta salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk mendapatkan pemimpin negara, daerah, maupun wakil rakyat yang mampu mensejahterakan rakyatnya. Di Indonesia pemilihan umum sendiri dilandaskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun asas dari pemilihan umum di Indonesia adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil). Pemilihan Umum ditujukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota legislatif. Sedangkan untuk pemilihan yang sifatnya regional seperti kepala daerah dalam pelaksanaannya disebut dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Pemilihan kepala daerah (pilkada) termasuk ke dalam pemilu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dimana seorang kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.<sup>1</sup> Setelah penundaan waktu, pemerintah akhirnya menetapkan penyelenggaraan pilkada melalui PP Nomor 2 Tahun 2020 dimana pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan tersebut sebelumnya ditunda karena pada tahun 2020 Indonesia bahkan dunia sedang

---

<sup>1</sup> Salsabila Yumna Fadhila dan Dewi Erowati, "Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Politik Islam*, Vol. 4 No. 1: hal 64, Januari-Juni, 2021.

dalam masa pandemi covid-19.<sup>2</sup> Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) ditujukan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Walikota dan wakil walikota merupakan pemimpin yang menjalankan pemerintahan di wilayah kota. Pada saat pasangan walikota dan wakil walikota akan mencalonkan diri, pasti sebelum itu mereka sudah membuat dan memikirkan visi, misi, serta program kerja yang akan dilakukan selama masa pemerintahannya jika terpilih nanti. Setelah terpilih dan resmi dilantik menjadi walikota dan wakil walikota tentu saja pasangan tersebut akan melakukan dan menjalankan visi dan misinya serta janji-janji saat kampanye. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai kinerja dari walikota dan wakil walikota. Pemerintahan yang dijalankan atau bisa disebut dengan kinerja pemerintah pasti memiliki penilaiannya. Penilaian tersebut biasanya banyak datang dari masyarakat daerah atau wilayah yang dipimpin oleh walikota dan wakil walikota tersebut. Karena masyarakat yang ikut langsung merasakan kinerja dari pemerintahan walikota dan wakil walikotanya. Tentu saja penilaian yang datang dari masyarakat itu berbeda-beda. Dimana ada masyarakat yang puas terhadap kinerja pemerintahnya dan ada juga masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah.

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka pelanggan puas. Jika kinerja

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 65

melebihi harapan maka pelanggan akan merasa amat puas atau senang.<sup>3</sup> Menurut Nasution kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Schnaars menyebutkan bahwa terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat, diantaranya hubungan antara pelanggan dengan instansi menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembeli (pemakaian) ulang, terciptanya loyalitas dari pelanggan serta terbentuknya rekomendasi dari mulut ke mulut yang kesemuanya menguntungkan perusahaan.<sup>4</sup>

Kepuasan masyarakat terhadap pemerintah sangat penting adanya, karena hal tersebut guna untuk menciptakan hubungan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Menurut Pasolong semakin baik pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>5</sup> Dapat disimpulkan bahwa semakin masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintahnya maka akan semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat tersebut kepada pemerintahnya. Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyebutkan bahwa ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Luh Dea Damayanti dkk, “Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, Vol 11 No. 1: hal 22, 2019.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 23

<sup>5</sup> *Op.Cit*, hal 22

<sup>6</sup> Aria Mulyapradana dan Amalia Rizqi, “Upaya Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Pekalongan Timur”, *Jurnal Widya Cipta*, Vol I, No. 2: hal 134, September, 2017.

Untuk mendapatkan suatu kepuasan dari masyarakat terhadap apa yang dilakukan atau diberikan oleh sebuah kelompok, instansi, maupun badan usaha harus bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan maupun keinginan dari masyarakat maka sebuah kelompok, instansi, dan badan usaha itu akan mendapatkan kepuasan dari masyarakat. Jika dalam sebuah instansi pemerintahan biasanya yang dinilai oleh masyarakat adalah kinerja dari instansi pemerintahan tersebut. Menurut Mahsun kinerja merupakan sebuah gambaran dari tingkat pencapaian dari pelaksanaan suatu kegiatan, program kerja atau kebijakan yang dimana hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah dibuat.<sup>7</sup> Keberhasilan pemerintah dalam membangun sebuah kinerja yang baik dengan professional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat *image* positif pemerintah di mata masyarakatnya.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua adanya wabah covid-19 di Indonesia dan tahun 2022 merupakan tahun pasca pandemi dimana covid-19 di Indonesia mulai mengalami penurunan dan sudah mereda, seperti yang kita ketahui di tahun tersebut pemerintah mulai mengejar semua keteringgalan karena dampak pandemi. Pada periode tersebut juga pemerintahan Erman Safar telah berlangsung selama dua tahun di Kota Bukittinggi. Memimpin sebuah wilayah pada era pandemi dan mulai bangkit untuk mengejar keteringgalan pasca pandemi ini tidaklah mudah, hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang cukup sulit bagi pemerintahan Erman Safar. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, karena di masa

---

<sup>7</sup> Sunardi dkk, "Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Vol. 13 No. 2: hal 156, Juli, 2019.

pandemi ini semuanya sangat terbatas. Dari mulai berkegiatan, bekerja, dan bersekolah dibatasi pada masa pandemi ini. Hal tersebut yang menjadi tantangan besar bagi Erman Safar-Marfendi untuk mewujudkan visi dan misinya serta meningkatkan kinerjanya.

Pada pemerintahannya, pasangan ini mengusung visi “Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Erman Safar-Marfendi memiliki tujuh misi yaitu hebat dalam sektor ekonomi kerakyatan; hebat dalam sektor pendidikan; hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan; hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya dan olahraga; hebat dalam tata kelola pemerintahan; hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan; dan hebat dalam sektor bidang pertanian.<sup>8</sup> Pendapatan terbesar Kota Bukittinggi berasal dari sektor perdagangan dan jasa, hal yang menarik untuk diteliti adalah kepuasan masyarakat Kota Bukittinggi di bidang Perekonomian. Tepat pada tanggal 26 Februari 2023 adalah dua tahun berjalannya pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi yaitu Erman Safar-Marfendi.

Bukittinggi merupakan kota terbesar ke-6 di Provinsi Sumatera Barat, dimana Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah sebesar 25,24 km<sup>2</sup>. Memiliki julukan sebagai kota wisata, Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Kota Bukittinggi memiliki empat pasar induk yang mendukung aktivitas perekonomiannya yaitu pasar atas, pasar bawah, pasar banto dan pasar simpang aur. Bukittinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar

---

<sup>8</sup> Pemerintah Kota Bukittinggi, “Profil Pemerintah Kota Bukittinggi”, dalam <https://www.bukittinggikota.go.id/site>, diakses pada 20-05-2023 pukul 10.05 WIB.

kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang. Dimana sektor perdagangan dan jasa menjadi sektor dominan yang menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakatnya. Sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor penyumbang utama bagi pendapatan Kota Bukittinggi. Hampir setengah pendapatan daerah pada tahun 2005 yaitu sebanyak 43% yang ditunjukkan dengan Kota Bukittinggi menjadi pusat pelayanan perdagangan dan jasa.<sup>9</sup>

Berbicara mengenai tingkat perekonomian di Kota Bukittinggi, berdasarkan data sekunder yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ekonomi di Kota Bukittinggi pada Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha yaitu meningkat pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan tahun 2020 yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang cukup berat.<sup>10</sup> Selain itu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar Rp 36 miliar lebih. Kemudian Kota Bukittinggi juga tercatat sebagai daerah dengan PDRB per kapita tertinggi di Sumatera Barat pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 74,24 juta.<sup>11</sup>

Ketika kampanye, pasangan Erman Safar-Marfendi khususnya di bidang perekonomian ia menjanjikan akan mengoptimalkan pengelolaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pedagang pasar, serta penataan

<sup>9</sup> Pemerintah Kota Bukittinggi, “Tentang Kota Bukittinggi”, dalam <https://www.bukittinggikota.go.id/>

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, “PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020-2022”, dalam <https://bukittinggikota.bps.go.id/indicator/11/157/1/pdrb-kota-bukittinggi-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>

<sup>11</sup> Pemerintah Kota Bukittinggi, “Realisasi PAD Naik dan PDRB per Kapita Tertinggi se-Sumbar, Ekonomi Bukittinggi Mulai Pulih”, dalam <https://www.bukittinggikota.go.id/berita/realisasi-pad-naik-dan-pdrb-per-kapita-tertinggi-se-sumbar-ekonomi-bukittinggi-mulai-pulih> , diakses pada 09-06-2023 pukul 12.29 WIB.

pedagang kaki lima (PKL). Tidak hanya itu, Erman Safar dan Marfendi juga menjanjikan pencabutan Peraturan Walikota Bukittinggi No. 40/41 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan dan Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.<sup>12</sup> Realitanya terhadap janji kampanye pencabutan Perwako No. 40/41 Tahun 2018 sudah ditepati oleh Erman Safar-Marfendi. Setelah enam bulan masa pemerintahannya setelah dilantik, pasangan Erman Safar-Marfendi resmi mencabut Perwako No.40/41 Tahun 2018 yang selama ini dianggap memberatkan pedagang di Kota Bukittinggi.<sup>13</sup>

Tapi pada janjinya dalam mengoptimalkan pengelolaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pedagang pasar serta penataan pedagang kaki lima dirasa masih belum optimal. Banyak yang merasa bahwa Erman Safar-Marfendi hanya fokus kepada pedagang kaki lima saja. Pada faktanya para pedagang di Bukittinggi sering protes kepada pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Seperti pada tanggal 30 september 2022, telah terjadi aksi demonstrasi oleh pedagang Jalan Minangkabau Bukittinggi dalam hal penolakan terhadap rencana pembangunan *awning* di sepanjang Jalan Minangkabau tersebut.<sup>14</sup> Kemudian pada tanggal 1 November 2022 kemarin, seluruh pedagang pasar di Bukittinggi melakukan aksi demonstrasi dengan agenda penolakan

<sup>12</sup> Rakyat Sumbar.id, “Usai Dilantik, Erman Safar-Marfendi Akan Realisasikan Janji Kampanye”, dalam <https://rakyatsumbar.id/usai-dilantik-erman-safar-marfendi-akan-realisasikan-janji-kampanye/>, diakses pada 28-05-2023 pukul 12.20 WIB.

<sup>13</sup> Pemerintah Kota Bukittinggi, “Perwako No. 40 dan 41 Tahun 2018 Resmi Dicabut”, dalam <https://www.bukittinggikota.go.id/berita/perwako-no-40-dan-41-tahun-2018-resmi-dicabut#:~:text=Wali%20Kota%20Bukittinggi%20Erman%20Safar,Bukittinggi%20Nomor%2041%20Tahun%202018>, diakses pada 28-05-2023 pukul 12.35 WIB.

<sup>14</sup> Suarasumbar.id, “Pedagang Jalan Minangkabau Bukittinggi Demo Tolak Pembangunan *Awning*”, dalam <https://sumbar.suara.com/read/2022/09/30/205257/pedagang-jalan-minangkabau-bukittinggi-demo-tolak-pembangunan-awning>, diakses pada 06-06-2023 pukul 10.18 WIB

terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar pasal 15 poin 4.<sup>15</sup> Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin melihat mengenai pengaruh kinerja pemerintahan Erman Safar-Marfendi terhadap kepuasan masyarakat Kota Bukittinggi di bidang perekonomian

Penelitian mengenai kepuasan masyarakat ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Andri Irawan dan Esi Fitriani Komara yang berjudul “Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung”, penelitian ini fokus kepada bentuk pelayanan pemerintahan di kecamatan Katapang.<sup>16</sup> Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Supriadi Binalombongan dengan judul “Pengaruh Program *Smart City* terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat”, dimana penelitian ini fokus kepada pengukuran tingkat kepuasan masyarakat pada sebuah program yang dibuat oleh pemerintah.<sup>17</sup> Perbedaan fokus penelitian yang peneliti akan lakukan dengan penelitian terdahulu menjadi kebaruan dari penelitian ini. Penelitian mengenai kepuasan masyarakat Kota Bukittinggi terhadap kinerja Pemerintahan Erman Safar-Marfendi di bidang perekonomian terfokus pada kinerja pemerintah di bidang perekonomiannya. Sedangkan pada penelitian

---

<sup>15</sup> Harian singgalang, “Tolak Perda Pengelolaan Pasar, Pedagang: Ustaz Abdul Somad Tolong Tegur Walikota Bukittinggi”, dalam <https://hariansinggalang.co.id/tolak-perda-pengelolaan-pasar-pedagang-ustaz-abdul-somad-tolong-tegur-walikota-bukittinggi/> , diakses pada 06-06-2023 pukul 09.50 WIB

<sup>16</sup> Andri Irawan dan Esi Fitriani Komara, “Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung”, *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Vol 1, No 2: 2017.

<sup>17</sup> Supriadi Binalombongan, “Pengaruh Program *Smart City* Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat (Suatu Penelitian di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo)” (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2016).

terdahulu umumnya fokus kepada pelayanan di sebuah instansi atau kepuasan terhadap suatu kebijakan pemerintah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pasangan Erman Safar-Marfendi ketika kampanye sudah memberikan janji-janji yang akan dilakukan pada pemerintahannya jika mereka terpilih. Janji Erman Safar-Marfendi khususnya di bidang perekonomian adalah mengoptimalkan pengelolaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pedagang pasar, serta penataan pedagang kaki lima (PKL). Tidak hanya itu, Erman Safar-Marfendi juga berjanji akan mencabut Peraturan Walikota Bukittinggi No. 40/41 Tahun 2018 tentang Peninjauan Tarif retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan dan Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.<sup>18</sup> Penelitian ini fokus pada pengaruh kinerja pemerintah terhadap kepuasan masyarakat yang ditinjau dari aspek perekonomian terkhusus pada janji kampanye pasangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan sumber pendapatan terbesar Kota Bukittinggi adalah dari sektor perekonomian dimana sebagian besar penduduk Kota Bukittinggi bekerja sebagai pedagang. Kota Bukittinggi juga merupakan pusat perdagangan dan grosir terbesar di Pulau Sumatera.

Kemakmuran serta tingkat ekonomi yang tinggi disebuah wilayah atau daerah biasanya diukur dari besaran pendapatan perkapitanya. Berdasarkan data dari BPS, PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tahun 2020-2022 jumlahnya meningkat. Dimana pada tahun 2020 PDRB Kota Bukittinggi sebesar 8.627.533,47 ; kemudian di tahun 2021 meningkat

<sup>18</sup> Rakyat Sumbar.id, “Usai Dilantik, Erman Safar-Marfendi Akan Realisasikan Janji Kampanye”, dalam <https://rakyatsumbar.id/usai-dilantik-erman-safar-marfendi-akan-realisasikan-janji-kampanye/>, diakses pada 28-05-2023 pukul 12.20 WIB.

menjadi 9.026.564,58 ; dan pada tahun 2022 PDRB Kota Bukittinggi meningkat lagi menjadi 10.194.020,58. Dimana pada indikator perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor juga meningkat pada tahun 2020, 2021, 2022 yaitu sebesar 2.910.422,94 ; 2.993.968,47 ; dan 3.491.546,44.

**Tabel 1.1**  
**PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2020-2022**

Uraian	PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 910 422,94	2 993 968,47	3 491 546,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8 627 533,47	9 026 564,58	10 194 020,58

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Peningkatan jumlah PDRB Kota Bukittinggi juga sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bukittinggi. Jika dilihat dari tahun 2020 hingga 2022, jumlahnya terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PAD Kota Bukittinggi sebesar Rp 84 miliar, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp 91 milyar, dan peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2022 sebesar 36 milyar sehingga PAD Kota Bukittinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 127 milyar lebih.<sup>19</sup>

**Tabel 1.2**  
**PAD Kota Bukittinggi Tahun 2020-2022**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2020	84 milyar
2021	91 milyar
2022	127 milyar

<sup>19</sup> Beritamerdekaonline, "Kota Bukittinggi Realisasi PAD Triwulan II Capai 32,72 Persen", dalam <https://www.beritamerdekaonline.com/2023/07/kota-bukittinggi-realisisi-pad-triwulan-ii-capai-3272-persen/>, diakses pada 22-12-2023 pukul 17.16 WIB

*Sumber : diolah peneliti*

Pemerintah Erman Safar-Marfendi sudah menjalankan pemerintahannya terkhusus di bidang perekonomian sudah cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita Kota Bukittinggi. Kemudian jumlah PDRB dan laju pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi juga meningkat dari tahun ke tahunnya. Tidak hanya itu, berdasarkan data yang ada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bukittinggi juga meningkat setiap tahunnya bahkan meningkat dengan signifikan pada tahun 2022. Hal tersebut menandakan masyarakat Bukittinggi cukup makmur.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Kota Bukittinggi Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Kecil	Menengah	Mikro	Jumlah
1.	ABTB	13	0	1505	1.518
2.	GP	28	0	2406	2.434
3.	MKS	9	0	3512	3.521
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>7423</b>	<b>7.473</b>

*Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2023*

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Tenaga Kerja menurut Jenis Kelamin pada UMKM Per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022**

No.	Kecamatan	L	P	L + P
1.	ABTB	547	934	1481
2.	GP	887	1968	2855
3.	MKS	1064	2068	3137
	<b>Jumlah</b>	<b>2503</b>	<b>4970</b>	<b>7473</b>

*Sumber: Dinas KUKMP Kota Bukittinggi Tahun 2023*

Jumlah UMKM di Kota Bukittinggi pada tahun 2022 adalah 7.473 dengan rincian per-kecamatannya yaitu di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh jumlah UMKM sebanyak 1.518 dengan klasifikasi usaha kecil berjumlah 13, dan usaha mikro sebanyak 1.505. Di kecamatan Guguk Panjang jumlah UMKM sebanyak 2.434 dengan klasifikasi usaha kecil sebanyak 28 dan usaha mikro sebanyak

2.406. Di kecamatan Mandiangin Koto Selayan jumlah UMKM sebanyak 3.521 dengan klasifikasi jumlah usaha kecil sebanyak 9 dan usaha mikro sebanyak 3.512.

Untuk menunjang produktivitas kerja, dibutuhkan program pelatihan kerja sesuai kebutuhan. Di Kota Bukittinggi, pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan kepada masyarakat guna menambah keterampilan sehingga bisa meningkatkan usaha dan pendapatan keluarga.



**Tabel 1.5**  
**Pelatihan Produktivitas Tahun 2022**

No.	Nama Pelatihan	Bulan	Peserta Perempuan	Peserta Laki-Laki	SKPD
1.	Pelatihan Kewirausahaan	Maret 2022	16 orang	-	Dinas Koperasi, UKM & Naker
2.	Pelatihan Kuliner	November	16 orang	-	Dinas Koperasi, UKM & Naker
3.	Pelatihan Menjahit	November	20 orang	-	Dinas Koperasi, UKM & Naker
4.	Pelatihan Tata Boga	November	16 orang	-	Dinas Koperasi, UKM & Naker
5.	Pelatihan Perbengkelan	November s/d Desember	-	16 orang	Dinas Koperasi, UKM & Naker
6.	Pelatihan Kuliner	September	25 orang	-	DP3APPKB
7.	Pelatihan Batik	Oktober	12 orang	8 orang	DPMPPTSP
8.	Pelatihan Menyulam	Juni	15 orang		DPMPPTSP
9.	Pelatihan Pemasaran Online produk khas daerah untuk peserta UPPKS kecamatan Guguk Panjang		70 orang		DP3APPKB
10.	Fasilitasi Kelompok UPPKS dengan sumber modal		70 orang		DP3APPKB
11.	Pelatihan Manajemen Usaha bagi kelompok UPPKS kec. G. Panjang		70 orang		DP3APPKB
12.	Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan		70 orang		DP3APPKB

Pemahaman Perlengkapan Produksi		
13. Pelatihan Penguatan Ekonomi Kelompok UPPKS Kec. MKS	70 orang	DP3APPKB
<b>Jumlah</b>	<b>470 orang</b>	<b>24 orang</b>

*Sumber : Profil Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2023*

Dilihat dari data yang ada, sudah banyak pencapaian serta program-program yang sudah direalisasikan oleh pemerintah Kota Bukittinggi. Pencapaian tersebut seperti Kota Bukittinggi berada pada peringkat pertama di Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah dengan pendapatan perkapita tertinggi serta meraih penghargaan terbaik ke-lima dalam sektor ekonomi nasional.<sup>20</sup> Kemudian Pemerintah Kota Bukittinggi meraih penghargaan nasional dari mendagri atas keberhasilan Kota Bukittinggi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Indonesia.

Pencapaian selanjutnya adalah dihapuskannya Perwako nomor 40 Tahun 2018 tentang peninjauan tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dan Perwako nomor 41 tahun 2018 tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar, membuat pelatihan keterampilan menjahit bagi perempuan pelaku ekonomi, penyusunan riset potensi daerah, revitalisasi pasar bawah oleh Kementerian Perdagangan RI, dan pembentukan BUMD baru di Kota Bukittinggi.<sup>21</sup>

Di sisi lain, masih banyak para pedagang Bukittinggi yang mengkritik pemerintahan Erman Safar-Marfendi terkhusus di bidang perekonomian. Para

<sup>20</sup> AntaraSumbar, "Bukittinggi Raih Penghargaan terbaik Ke-Lima dalam Sektor Ekonomi Nasional", dalam <https://sumbar.antaranews.com/berita/509133/bukittinggi-raih-penghargaan-terbaik-ke-lima-dalam-sektor-ekonomi-nasional> , diakses pada 10-06-2023 pukul 11.04 WIB

<sup>21</sup> Metrokini.com, "100 Hari Kinerja Walikota Bukittinggi, Erman Safar: Beberapa Capaian Telah Berhasil Dilaksanakan", dalam <https://www.metrokini.com/2021/06/08/100-hari-kinerja-walikota-bukittinggi-erman-safar-beberapa-capaian-telah-berhasil-dilaksanakan/> , diakses pada 10-06-2023 pukul 08.47 WIB.

pedagang tersebut mengkritik hingga melakukan aksi demonstrasi terhadap peraturan-peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh Erman Safar-Marfendi di bidang perekonomian. Seperti pada tanggal 30 september 2022, telah terjadi aksi demonstrasi oleh pedagang Jalan Minangkabau Bukittinggi dalam hal penolakan terhadap rencana pembangunan *awning* di sepanjang Jalan Minangkabau tersebut.<sup>22</sup> Kemudian pada tanggal 1 November 2022 kemarin, seluruh pedagang pasar di Bukittinggi melakukan aksi demonstrasi dengan agenda penolakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar pasal 15 poin 4. Hal tersebut dianggap akan memiskinkan seluruh pedagang Kota Bukittinggi. Realita yang terjadi berbanding terbalik dengan janji Erman Safar pada saat kampanye, yaitu akan mengoptimalkan semua pedagang pasar, pedagang kaki lima serta UMKM Kota Bukittinggi.

Masih banyak masyarakat Kota Bukittinggi yang memberikan kritik serta komentar negatif, misalnya dalam unggahan akun [@bukittinggiku.ig](#) pada artikel “Erman Safar Sebut Dirinya Didukung Ulama untuk Maju Menjadi Walikota Padang”. Adapun beberapa komentar yang menyatakan tidak suka tersebut adalah

“Ngurus Kota Bukittinggi yg kecil aja engga beres, malah mau jadi Walikota Padang, pake jual nama2 ulama lagi, ngacak jejak digital mu,” tulis akun [@ismail\\_johan\\_](#).

“Capek la pindah padang Pak. Nanti 2021-2024 bukik. 2024-2027 padang.. 2027-2031 gubernur ... 2031-2034 presiden se sakali nda pak. Asal nda dibukik lai... ngomong2 bisa jualan prestasi nda Pak? Jaan jualan2 pakai namo ulama lai? Kanai prank kota bukik salamo jabatan bapak,” tulis akun [@in1384dra](#).

“Mohon jangan ke padang kami ikhlas anda tetap di bukittinggi,” tulis akun [@laptopsecondpadang](#).

<sup>22</sup> Suarasumbar.id, “Pedagang Jalan Minangkabau Bukittinggi Demo Tolak Pembangunan Awning”, dalam <https://sumbar.suara.com/read/2022/09/30/205257/pedagang-jalan-minangkabau-bukittinggi-demo-tolak-pembangunan-awning> , diakses pada 06-06-2023 pukul 10.18 WIB

*“Gorong<sup>2</sup> baa kabanyo pak? Lah sampai ma mambalah jalan di bukkik kini? Terakhir pas rayo patang baru sampai swalayan niagara nampaknyo,” tulis akun @rozialwi<sup>23</sup>.*

Selain itu terdapat beberapa masyarakat yang menyampaikan kritiknya terhadap pemerintahan Erman Safar-Marfendi di bidang perekonomian secara langsung seperti yang dikatakan oleh seorang pedagang yang bernama Ibu Mimi Zuryani. *“Apo nan dibueknyo ndk ado yang tahan lamo do, program yang dibueknyo Cuma sabanta-sabanta se ndak ado yang berjangka panjang do”*. Terjemahan: *“Apa yang dia buat tidak ada yang bertahan lama, program yang dibuat hanya sebentar-sebentar saja tidak ada yang berjangka panjang”*.

Warga lainnya juga mengungkapkan kritiknya terhadap kinerja pemerintah bukittinggi di bidang perekonomian seperti yang disampaikan oleh saudara Hari Permana: *“Kegiatan pelatihan UMKM tu ndak marato do, untuak urang-urang inyo se, yang dakek jo inyo, tu tim sukses inyo”*. Terjemahan: *“Kegiatan pelatihan UMKM tidak merata, hanya untuk orang-orang yang dekat sama pemerintah saja dan juga tim suksesnya”*.

Di Kota Bukittinggi, penataan pedagang kaki lima masih menjadi permasalahan yang sangat kompleks pada saat ini. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh salah satu responden peneliti yaitu Ibu Mailizar, beliau mengatakan: *“Caliak kini jam gadang tu pedagang kaki limo kalamak hati inyo se dima manggaleh, baserak se, dima se manggaleh dibuliahah”* Terjemahan: *“Lihat saja sekarang di jam gadang, pedagang kaki lima sesuka hati dia dimana*

---

<sup>23</sup> Ocky A.M, “Erman Safar Sebut Didukung Ulama Maju Jadi Wali Kota Padang, Warganet Protes!”, dalam <https://katasumbar.com/erman-safar-sebut-didukung-ulama-maju-jadi-wali-kota-padang-warganet-protes/>

mau berjualan, tata letaknya sangat tidak teratur dimana saja mau berjualan diperbolehkan”.

Berdasarkan data tersebut peneliti berasumsi bahwa adanya pengaruh kinerja pemerintahan Erman Safar-Marfendi di bidang perekonomian terhadap kepuasan masyarakat Kota Bukittinggi pada tahun 2021 hingga 2023. Hal tersebut disebabkan karena masih ditemukan beberapa permasalahan dalam proses pemerintahan Erman Safar khususnya di bidang perekonomian. Berdasarkan data yang ada, sudah banyak pencapaian serta prestasi yang diraih oleh Kota Bukittinggi di bidang perekonomian terkhusus pada janji kampanyenya namun masih banyak masyarakat yang memberikan kritik serta protes terhadap pemerintahannya. Oleh karena itu, peneliti merumuskan permasalahan ini ke dalam sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana pengaruh kinerja pemerintahan Erman Safar dan Marfendi di bidang perekonomian terhadap kepuasan masyarakat Kota Bukittinggi tahun 2021-2023?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh kinerja pemerintahan Erman Safar-Marfendi di bidang perekonomian terhadap kepuasan masyarakat Kota Bukittinggi selama tahun 2021-2023

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian mengenai pengaruh kinerja pemerintahan Erman Safar-Marfendi di bidang perekonomian terhadap kepuasan masyarakat Kota Bukittinggi selama tahun 2021-2023 yaitu :

1. Secara akademis, penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk peneliti yang akan meneliti mengenai pengaruh kinerja pemerintah terhadap kepuasan masyarakat.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah :
  - a. Penelitian ini dapat menghasilkan teknik pengukuran yang lebih valid dan reliabel dalam mengukur pengaruh kinerja pemerintah terhadap kepuasan masyarakat Kota Bukittinggi.
  - b. Sebagai pengetahuan baru bagi pemerintah terkait untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintahannya.

